

MULTIKULTURISME BANGSA SEBAGAI KEKUATAN MEMPERKOKOH INTEGRITAS NASIONAL

Erman Anom

Fikom – Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta
Jl. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk Jakarta 11510
erman.anom@indonusa.ac.id

ABSTRAK

Konflik-konflik vertikal maupun horizontal menjadi hal lumrah yang harus dihadapi satu bangsa multikultur. Hal ini senada dengan tesis Samuel Huntington dalam *The Class and Civilization*-nya, yang menyatakan bahwa; “Perbedaan atau keragaman akan selalu memunculkan pertikaian dan konflik-konflik”. Menjadi satu hal menarik, jika tesis sosiolog Inggris ini diangkat dalam wacana keberagaman Indonesia. Dalam mengelola keberagaman di dalamnya, bangsa ini dapat memilih salah satu dari dua konsep ini yaitu konsep mozik dan konsep multikultur. Atau bahkan dapat mengkombinasikannya. Dengan melihat bahwa multikultur dapat dijadikan jembatan bagi konsep pembentukan budaya baru, yang baru bisa membentuk dirinya dalam waktu yang lama. Jadi konsep pertama dapat dikatakan sebagai awal dimulainya upaya pembentukan budaya baru Indonesia. Bangsa ini belum selesai membentuk dirinya, bangsa ini masih berproses, dan mungkin akan terus berproses mencari bentuknya yang paling ideal. *Save our culture, save our nation*.

Kata Kunci:

Multi Kultur, Keutuhan Bangsa, Integritas Nasional

Pendahuluan

Hantu-hantu pertikaian dan perpecahan hampir selalu menjadi momok yang harus dihadapi oleh satu bangsa yang majemuk. Sudah menjadi hal alamiah bahwa keberagaman akan membawa benturan-benturan. Benturan-benturan yang dapat berkembang ke arah konflik-konflik antar elemen di dalamnya.

Memandang konsep ini, tak harus selalu melihatnya fokus hanya pada pertentangan yang ditawarkannya. Menerawang hal ini dalam konteks ke Indonesiaan dapatlah dipandang sebagai sentilan Huntington yang mencoba mengingatkan bangsa ini agar sungguh-sungguh menjaga dan memelihara kemultikulturalannya.

Dalam tulisan ini setidaknya akan dibahas dua tema dasar. *Pertama*, rupa multikultural di Indonesia. Jelas ada perbedaan konteks multikultur, antara Amerika misal, dengan konteks multikultur di Indonesia. Di sini akan dilihat betul bentuk

multikultural Indonesia itu seperti apa. Kemudian, agar lebih menarik wacana ini akan diteruskan dengan membaca konsep multikultural Indonesia melalui tulisan Radhar Panca Dahana.

Radar memberikan tawaran menarik yang perlu dicermati berkenaan dengan multikultur Indonesia, melalui *mozaik manusia Indonesia*-nya. Dari konsep mozaiknya ini, Radar sedikit memberi gagasan yang agak berbeda tentang kejamakan bangsa ini. *Kedua*, melalui tulisan ini pembaca akan sedikit diajak merefleksikan keberagaman Indonesia ke depan. Seberapa jauhkah keberagaman budaya ini berkembang dan berkontribusi terhadap bangsa ini?

Keberagaman Budaya Indonesia

Pada dasarnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang begitu kental menyadari bahwa di dalam dirinya ada keragaman yang membentuk jati dirinya. Dari zaman Majapahit hingga era sumpah pemuda bahkan sampai sekarang, keragaman itu telah menjadi tulang dan sum-sum bangsa ini. Namun sayangnya kesadaran itu seakan terusik ketika sebuah rezim mulai berkuasa di awal tahun tujuh puluhan.

Masih hangat terasa di benak bangsa ini, bagaimana upaya Bapak Pembangunan Indonesia (Soeharto) dengan kebijakan “kemanunggalannya” berusaha *memanage* keberagaman Indonesia. Di mana-mana didengungkan budaya nasional, yang mengatasnamakan keragaman dan kebhinekaan. Di setiap tempat muncul tuah kalimat Mpu Tantular, “Bhineka Tunggal Ika; walau berbeda tetap satu jua”, orang menjadi takut untuk tidak mengatakan setuju pada kalimat keramat ini. Meskipun, tak ada yang salah dengan tiga kata ini, tapi perbincangan berkenaan dengannya mengenai wacana budaya nasional integralistik yang diterapkan Soeharto, menjadi wacana yang begitu menarik perhatian. Karena integral, budaya bangsa yang ditegakkan, menjadi kumpulan budaya-budaya yang harus menyesuaikan diri dengan budaya yang diinginkan Soeharto (Jawa).

Pengakuan budaya lokal lain (selain Jawa) hanyalah pengakuan *de facto* belaka, sedangkan secara politis budaya-budaya ini tak dianggap sebagai sebuah entitas yang benar-benar ada. Konsep Bhineka Tunggal Ika yang diterapkan era Orde Baru ini, tak ubahnya sebagai upaya penyeragaman budaya dengan bingkai palsu kemajemukan yang mengabaikan hak-hak budaya lainnya. Dan ujung-ujungnya tetap, yaitu; “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan satu budaya kita”. Suara keberbedaanpun akhirnya diartikan sebagai bermacam suara yang harus satu. Sejalan dengan Yasraf Amir Piliang yang mengatakan bahwa, “Indonesia di tangan Soeharto melihat disorder—ketidakpastian, ketakberaturan—dalam keberagaman sebagai sebuah ancaman.” Keberagaman adalah ancaman dan tanda-tanda adanya perpecahan. Penyeragaman dalam tubuh yang memiliki keragamanpun akhirnya terjadi. Menurut Soeharto penyeragaman merupakan cara tepat untuk mengatur ketakberaturan dalam budaya bangsa ini. Pada akhirnya slogan bangsa—bhineka tunggal ika—kemudian menjadi kata-kata usang tanpa makna. Ke-ika-an tak lagi melihat kebhinekaan, sedangkan kebhinekaan tak mampu lagi berdiri karena tekanan kebijakan.

Penanganan Soeharto terhadap keberagaman budaya Indonesia pada masa pemerintahannya, memunculkan masalah-masalah serius terhadap persatuan dan perkembangan psikis bangsa ini. *Pertama*, penyatuan elemen-elemen keberagaman dalam satu wadah yaitu budaya nasional yang seharusnya ditujukan untuk mempersatukan bangsa, menjadi satu kebijakan yang berbalik arah menggerogoti persatuan bangsa yang telah ada. Gambaran budaya nasional yang tidak merepresentasikan kebudayaan Indonesia yang diharapkan, menimbulkan bermacam kebencian dan kecemburuan nasional. Budaya nasional yang oleh Soeharto diupayakan agar sesuai dengan budaya Jawa, melahirkan diskriminasi yang ditunjang dengan kekuatan kuasa terhadap individu-individu yang berbudaya lain, selain Jawa. Dan pada akhirnya, diskriminasi dan tekanan yang dibuat oleh rezim orde baru ini berbuah rasa apatis, pesimis bahkan sampai-sampai muncul tindakan subversif dan separatis dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang otoriter. Meski gerakan separatis semisal di Aceh yang mulai muncul pada era 80-an memiliki berbagai alasan yang melatarbelakangi gerakan pemisahan itu. Namun, satu hal yang perlu digaris bawahi, munculnya gerakan ini adalah buntut dari rangkaian panjang kegagalan Soeharto dalam mengelola keragaman etnik dan budaya yang ada. Dari sinilah ketika semakin banyak muncul

kecemburuan dan kebencian yang diakibatkan salah ambil kebijakan, maka benih-benih separatisme tinggal menunggu waktu untuk tumbuh dan berkembang. *Kedua*, kebijakan Soeharto yang dilakukan dengan berbagai “kekerasan” baik fisik maupun non fisik, berdampak pada pola pikir dan psikis manusia-manusia Indonesia. Tren menghujat, acuh, dan dendam kesumat terhadap pemerintah melanda di seluruh pelosok negeri. Kepercayaan terhadap penguasapun menjadi hal yang begitu langka. Parahnya lagi, orang-orang yang merasakan pahitnya kebijakan pemerintahan Soeharto, pada umumnya muncul sebagai orang-orang yang egois dan individualis, di samping pesimistis, dan apatis. Kebijakan yang dihadapi manusia Indonesia menjadi peraturan yang kerap bertentangan dengan individu-individu yang harus melaksanakannya. Kondisi semacam ini yang terus dipupuk dan dibiarkan berlarut-larut, jelas membawa dampak negatif bagi perkembangan psikis bangsa. Dengan kondisi psikis yang seperti ini, maka implikasinya adalah semakin sulitlah manusia-manusia Indonesia menghargai satu sama lain. Ketika pemerintah tak lagi menjadi pengayom, maka kolektivitas individu akan semakin terpancang pada kelompok masing-masing. Dalam kelompok ini mereka setidaknya merasa cukup terlindungi dari ancaman individu lain maupun tekanan pemerintah.

Secara langsung Soeharto benar-benar telah mencetak manusia-manusia eksklusif yang cenderung melihat entitas di luar diri atau kelompok dengan kacamata kelompok masing-masing. Multikulturalisme pun semakin jauh dijangkau dan direalisasikan. Masa Soeharto penghormatan terhadap keberagaman masih sebatas pengakuan keberadaan tanpa mengindahkan unsur politis di sana. Rupa keberagaman dalam bhineka tunggal ika terpasung dalam konsep asimilasi yang mengupayakan peleburan keberagaman dalam kemanunggalan utuh.

Keberagaman Budaya Bangsa dan Integritas Nasional

Akan menarik sekali saat membaca gagasan Radhar ini. Ketika gerakan-gerakan multikultur menyuarakan bahwa dalam keragaman harus ada kesetaraan dan pengakuan keberadaan total satu entitas, maka Radhar dengan konsepnya mengatakan, “marilah melebur dalam satu, lupakan tradisi, lupakan golongan, lupakan keberbedaan kita, dan sambutlah Indonesia kita”. Satu gagasan yang mempesona, menggelitik dan menohok kita, mengenai kita, dan siapa kita.

Lain halnya dengan konsep perbedaan dalam satu yang dipraktekkan Soeharto, konsep peleburan yang ditawarkan Radhar tidak memungkinkannya adanya kekerasan, maupun pemusatan budaya nasional pada budaya dominan. Kemudian, jika Soeharto merevolusisasi konsep keberagaman, maka Radhar menginginkan adanya evolusi dalam keragaman itu. Evolusi akan lebih menjamin langgengnya kedamaian daripada sekedar revolusi yang akhirnya menancapkan kuku permusuhan di dalam diri bangsa Indonesia, setidaknya revolusi budaya yang dipraktekkan Soeharto. Tak perlu terburu-buru untuk mendewasakan bangsa ini. Masyarakat Indonesia adalah bangsa dengan tipikal sulit menerima perubahan secara frontal. Perubahan itu harus bekerja perlahan, pelan, atau bahkan meningkat tanpa ketahuan dalam mempengaruhi pola pikir manusia Indonesia. Perubahan itu harus dilakukan dengan jalan penyadaran terhadap manusia-manusia Indonesia. Kesadaran akan hakikat keberagaman yang lama tenggelam yaitu ke-Indonesiaan kita. Ke-indonesian yang harus dapat dimunculkan.

Radhar melihat bahwa keberagaman di dalam tubuh Indonesia pada dasarnya tidak dilandasi dengan orisinalitas elemen-elemennya. Elemen-elemen itu hanya bentukan sejarah yang kapanpun bisa berubah. Melalui latar belakang orisinalitas inilah Radhar, menyatakan bahwa perdebatan siapa yang berhak ini dan berhak itu, terhadap Indonesia tidaklah perlu dilakukan.

Karena pada dasarnya tak ada yang benar-benar pribumi dan asli dari elemen-elemen bangsa dalam negeri yang bernama Indonesia ini. *“Kita semua tersusun dari pecahan-pecahan identitas orang lain. Kita hadir dengan memasukkan bagian-bagian mereka dalam diri kita. Jadi tak ada yang origin atau sesuatu yang asli dari pribadi kita.*

Jika melihat kembali konsep yang ditawarkan Radhar, dengan pengamatan yang lebih mendalam dan intens, akan muncul satu pertanyaan klasik. Akankah konsep ini dapat direalisasikan, atau paling tidak dapat dipraktekkan dalam konteks keberagaman Indonesia? Sayangnya Radhar tidak menjelaskan secara terperinci konsep yang ia tawarkan. Dan jika gagasannya ini ibarat rumah, dia hanya mengantarkan sampai gerbang, membuka pintu, dan mempersilahkan kita memasuki gagasan ini, dengan sedikit memberi petunjuk arah. Sulit sekali menjabarkan, apalagi merealisasikan mozaik manusia Indonesia yang ditawarkan Radhar. Secara garis besar gagasan Rhadar ini hanya melihat keberagaman Indonesia ini melalui sudut pandang kultural, yang memang jauh-jauh sebelumnya telah

ia konsepsikan dalam gagasan mozaik manusia Indonesianya.

Cara yang dapat mempersatukan dan menyatukan bangsa ini hanya menyisakan ini. Metode ekonomi, terbukti telah runtuh puluhan tahun yang lalu ketika ekonomi kerakyatan didengungkan roboh. Dan juga ketika metode ekonomi diangkat rezim Orba yang kemudian tumbang diterpa krisis ekonomi, persatuan dan kesatuan yang dibuat, luluh-lantah bersamaan tumbangannya perekonomian negeri ini.

Kemudian, penggunaan cara-cara ala mili-terpun mengalami nasib yang sama, pada awalnya nampak berhasil mempersatukan bangsa, namun pada akhirnya tekanan-tekanan yang diciptakannya tak mampu melemahkan tumbuhnya bibit-bibit perpecahan. Maka sudut pandang kultural ini menjadi jalan terakhir mempersatukan bangsa, dengan cara membudayakan kesadaran akan keberagaman dalam diri manusia-manusia Indonesia. Meskipun akan memakan waktu yang panjang, tapi ide utopian ini memberikan harapan besar demi terciptanya perdamaian yang lebih untuk bangsa ini.

Tentu memerlukan tahapan-tahapan untuk merubah dari manusia yang belum sadar akan keberagaman menjadi manusia yang sadar akan keberagaman yang ada. Tahapan-tahapan ini tak bisa dilalui hanya dalam tempo satu atau dua tahun, bisa sepuluh, dua puluh, atau setara dengan pergantian satu generasi ke generasi yang lain. Hal *pertama* yang dapat dilakukan untuk membudayakan kesadaran akan keberagaman bangsa adalah menghilangkan perasaan yang memunculkan diri merasa paling orisinal, paling pribumi, paling asli dalam diri manusia-manusia Indonesia. Ketika perasaan superioritas ini dapat dihilangkan, maka keegoisan-keegoisan elemen-elemen keberagaman-pun dapat dinetralisir. Dan ruang-ruang yang tersedia untuk ditempati yang lain semakin lebar terbuka. Karena ketidakorisinalannya maka kesadaran *kedua* yang harus dibudayakan adalah kesadaran bahwa budaya itu selalu berkembang, budaya tidak akan pernah menemukan dirinya dalam totalitas yang *fix*. Budaya akan selalu membentuk dirinya. Dengan kesadaran ini, maka keterbukaan untuk menerima yang lainpun akan semakin mudah dilakukan. Inklusivisme yang kerap menjadi batu sandungan dalam mewujudkan Bhineka Tunggal Ika dalam artian yang sesungguhnya akan semakin terkikis.

Jika kesadaran-kesadaran ini berkembang dan berhasil mempengaruhi manusia-manusia Indonesia, maka upaya yang dapat dilakukan adalah membiarkan kesadaran itu tumbuh dan berkembang

dengan sendirinya. Membentuk karakter manusia Indonesia yang baru. Kemudian, masalah yang dihadapi ketika konsep ini hendak direalisasikan. Masalah yang dihadapi oleh konsep mozaik Indonesia ini bukanlah masalah identitas-identitas elemen-elemen dalam budaya nasional yang akan dibentuk. Masalah identitas ini bukan menjadi persoalan yang perlu diprioritaskan karena pada akhirnya identitas-identitas yang individual inipun tidak akan menjadi bagian penting dalam diri manusia-manusia Indonesia nantinya, di mana suku Jawa harus mengakui kejawaannya, suku Sunda harus mengakui kesundaannya, Batak dengan kebatakannya, itu semua tidak perlu. Lokalitas dalam era globalisasi ini, tidak lagi lokalitas kedaerahan yang membutuhkan identitas kedaerahan, tapi sudah meningkat lokalitas pada tingkat nasional.

Isu-isu yang didengungkan ke depan bukan lagi isu bagaimana mempertahankan budaya daerah, tapi budaya bangsalah yang akan menjadi taruhan dalam pentas percaturan globalisasi dunia. Bagaimana budaya bangsa ini harus bertahan, menempa dirinya, membuka diri, dan sebagainya. Hal-hal seperti inilah yang seharusnya mulai sekarang harus dipikirkan.

Namun sayangnya untuk sampai ke situ, akan ada tantangan besar yang harus dihadapi bangsa Indonesia, mengkonsepkan budaya nasional. Konsep budaya nasional adalah masalah yang selama ini menjadi bagian penting dalam gagalnya pengelolaan kemajemukan bangsa. Mengkonsepkan budaya nasional yang tersusun dari bermacam budaya yang berbeda adalah bagian tersulit dalam perjalanan bangsa ini. Ketika budaya nasional diidentikkan dengan satu budaya maka yang terjadi adalah perpecahan dan petikaian seperti pada masa Orba. Dan berbagai macam bentuk lainnya yang terus menghadapi kendala.

Kembali pada pembahasan sebelumnya, yaitu kendala yang dihadapi konsep mozaik Indonesia. Konsep ke-Indonesiaan yang ditawarkan Radhar ini, memiliki masalah mendasar mengenai terbentuknya budaya nasional ke depan. Ketika membicarakan mozaik Indonesia yang berisi kumpulan-kumpulan elemen yang membentuknya maka, arah terbentuknya mozaik itu tentu tak lepas dari elemen yang ada di dalamnya. Di sini ingin saya katakan bahwa konsep Radhar ini menghadapi dilema kualitas identitas.

Ketika kesadaran dan keterbukaan terhadap budaya lain termasuk budaya yang berasal dari luar muncul, maka terbentuknya budaya bangsa kemungkinan bisa menjadi baik atau bahkan tidak sesuai yang diharapkan. Inilah persoalan yang diha-

dapi konsep mozaik manusia Indonesiannya. Dengan cara apakah agar kesadaran dan keterbukaan menerima yang lain tidak sampai melampaui dan akhirnya menghilangkan makna budaya bangsa yang dicitakan? Ketika kesadaran dan keterbukaan itu tidak dikelola dengan baik dan benar maka yang muncul adalah mayat budaya baru menemani budaya hipies, kapitalis, budaya global.

Yasraf Amir Piliang mengatakan budaya seperti ini bukan lagi budaya yang bermakna, budaya tanpa kebenaran, tanpa moral, budaya yang telah mati dan kemudian menjadi tak berarti. Pengelolaan itu dapat dilakukan siapa saja, namun akan lebih efektif bila pemerintah yang melakukannya. Karena pemerintahlah dengan kewenangannya akan mampu *mamanage* ini, paling tidak kebijakan-kebijakan yang dibuat dapat menjadi pegangan manusia-manusia Indonesia dalam menentukan langkah ke depan.

Keragaman Budaya Indonesia saat ini dan masa depan

Beberapa waktu yang lalu, situasi di negeri ini sempat dihebohkan oleh pengibaran bendera RMS (Republik Maluku Selatan) di depan mata Presiden. Memalukan sekaligus memprihatinkan. “Sebuah upaya untuk menunjukkan diri” demikian *deadline* salah satu surat kabar nasional saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia belum berhasil *memanage* keberagaman yang ada.

Keberagaman yang ada dibiarkan tumbuh liar tanpa adanya perhatian yang diberikan. Maka, kemudian yang muncul adalah kasus-kasus semacam, kasus Poso, RMS, bintang kejora di Papua, dan lain-lain. Ini sudah menjadi bukti konkrit, bahwa kesadaran akan keberagaman di Indonesia masih sangat minim baik pemerintahnya maupun rakyatnya. Kesadaran di sini tak hanya sadar bahwa sejatinya bangsa ini memang berbeda, tetapi kesadaran di sini menekankan pengakuan akan keberadaan yang satu dengan yang lainnya.

Penyadaran keberagaman adalah kunci yang sesuai untuk meng-*handle* keberbedaan di Indonesia untuk memperkokoh integritas nasional. Ketika penyadaran ini sudah dilakukan maka terserah keberagaman itu mau diarahkan ke mana. Ke konsep multikultur dengan multikulturalismenya atau menjadikan bangsa ini sesuai dengan konsep mozaik.

Sebenarnya hanya perbedaan tipis yang membedakan konsep multikultur dengan konsep mozaik. Hanya penekanannya saja yang berbeda. Konsep multikultur menekankan bahwa semua bu-

daya-budaya yang ada harus diakui sebagai budaya bangsa dengan hak dan kewajiban yang sama, namun independensi diri dalam budaya-budaya itu tetap ada. Sedangkan konsep mozik menekankan pada pembentukan budaya baru yang diakui bersama. Kesemua ini dilakukan untuk kekuatan memperkokoh integritas nasional.

Kesimpulan

Untuk mengelola keberagaman di dalamnya, bangsa ini dapat memilih salah satu dari dua konsep ini yaitu konsep mozik dan konsep multikultur. Atau bahkan dapat mengkombinasikannya. Dengan melihat bahwa multikultur dapat dijadikan jembatan bagi konsep pembentukan budaya baru, yang baru bisa membentuk dirinya dalam waktu yang lama. Jadi konsep pertama dapat dikatakan sebagai awal dimulainya upaya pembentukan budaya baru Indonesia. Bangsa ini belum selesai membentuk dirinya, bangsa ini masih berproses, dan mungkin akan terus berproses mencari bentuknya yang paling ideal.

Daftar Pustaka

- Amir Piliang, Yasraf, "Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan", Jalasutra, Yogyakarta, 2004
- Erman Anom, "Multikulturisme dan Media", Modul Perkuliahan Pascasarjana ilmu Komunikasi, Universitas Mercubuana, Jakarta, 2007
- Liliweri, Alo, "Prasangka dan Konflik: Komunikasi lintas Budaya Masyarakat Multikultur", LKIS, Yogyakarta, 2005
- Panca Dahana, Radhar, "Inikah Kita: Mozaik Manusia Indonesia", Resist Book, Yogyakarta, 2007.
- Patria, Nezar, dan Andi Arief, "Antoni Gramsci: Negara Hegemoni", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Salim, Hairus, dan Suhadi, "Membangun Pluralisme dari Bawah", Modul belajar bersama, LKIS, Yogyakarta, 2007.